

DAFTAR REFERENSI

1. BUKU

- Ali, Mochamad Chidir. *Badan Hukum*. Cet. 3. Bandung: Alumni, 2005.
- Asshiddiqie, Jimly. *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi*. Cet. 2. Jakarta: PT. Bhuana Ilmu Populer, 2008.
- Atmadja, Arifin P. Soeria. *Keuangan Publik dalam Perspektif Hukum: Teori, Praktik, dan Kritik*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2009.
- _____. *Mekanisme Pertanggungjawaban Keuangan Negara: Suatu Tinjauan Yurids*. Jakarta: Gramedia, 1986.
- Burkhead, Jesse. *Budgeting*. New York: John Wiley & Son, Inc., 1967.
- Busroh, Abu Daud. *Derap Langkah Menabur Keadilan: Hukum, Politik, Hukum Tata Negara dan Hukum Tata Usaha Negara*. Palembang: STIH Sumpah Pemuda, 2005.
- _____. *Pemeriksaan Keuangan Negara*. Jakarta: Bina Aksara, 1988.
- Dalton, Hugh. *Principles of Public Finance*. London: Routledge & Kegan Paul Ltd., 1971.
- Darmodiharjo, Darji dan Shidarta. *Pokok-Pokok Filsafat Hukum: Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia*. Cet. 7. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008.
- Dwiyanto, Agus. *Et. al. Reformasi Birokrasi Publik di Indonesia*. Cet. 3. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2008.
- Fuady, Amir. *Teori Negara Hukum Modern*. Bandung: Rafika Aditama, 2009.
- Handayani, I Gusti Ayu Ketut Rachmi. "Sistem Pengawasan Eksternal vs. Internal". Dalam Satya Nugraha dan Ninuk Triyanti ed. *Memahami Hukum: Dari Konstruksi sampai Implementasi*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2009.
- Hayati, Tri. *Hukum Administrasi Negara (Matrikulasi II)*, Materi Kuliah Hukum Administrasi Negara 2009
- Hyman, David N. *A Contemporary Application of Theory to Policy*. New York: CBS College Publishing, 1983.

- Ilyas, Wirawan B. dan Richard Burton. *Hukum Pajak*. Ed. 4. Jakarta: Salemba Empat, 2008.
- Indrati S., Maria Farida. *Ilmu Perundang-Undangan: Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan Buku 1*. Yogyakarta: Kanisius, 2007.
- _____. *Ilmu Perundang-Undangan: Proses dan Teknik Pembentukannya Buku 2*. Yogyakarta: Kanisius, 2007.
- Ismail, Tjip. *Pengaturan Pajak Daerah di Indonesia, Edisi Kedua*. Jakarta: Yellow Printing, 2007.
- Lee, Robert D. Jr dan Ronald W. Johnson. *Public Budgeting Systems, Second Edition*. Baltimore: University Park Press, 1997.
- Leyland, Peter dan Terry Woods. *Administrative Law Facing the Future: Old Constraints and New Horizons*. London: Blackstone Press Limited, 1997.
- Mahfud MD, Moh. *Politik Hukum di Indonesia*, Edisi Revisi Cetakan Kedua. Jakarta: Rajawali Pers, 2009.
- Mertokusumo, Sudikno. *Penemuan Hukum Suatu Pengantar*. Cet. 11. Yogyakarta: Liberty, 2001.
- _____. *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, Cetakan Kedua. Yogyakarta: Liberty, 2005.
- Musgrave, Richard A. *The Theory of Public Finance: A Study in Public Economy*. New York: McGraw-Hill Book Company, Inc., 1959.
- Newman, Herbert E. *An Introduction to Public Finance*. New York: John Wiley and Sons, Inc., 1968.
- Pudyatmoko, Y. Sri. *Pengantar Hukum Pajak*. Yogyakarta: Andi Offset, 2009.
- Rosenbloom, David H. dan Robert S. Kravchuk. *Public Administration: Understanding Management, Politics, and Law in The Public Sector*. New York: The McGraw-Hill, 2005.
- Saffel, David C. dan Harry Basehart. *Governing States and Cities*. New York: The McGraw-Hill, 1997.
- Saidi, Muhammad Djafar dan Rohana Huseng, *Hukum Penerimaan Negara Bukan Pajak*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2008.
- Santoso, Pandji. *Teori dan Aplikasi Good Governance*. Bandung: Refika Aditama, 2008.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, 2008.

Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Cet. 11. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2009.

Suardy, Erly. *Hukum Pajak*, Edisi Keempat. Jakarta: Salemba Empat, 2008.

Tjahyono, Achmad dan Muhammad Fahri Husein. *Perpajakan: Pembahasan Berdasarkan Undang-undang dan Aturan Pajak Terbaru*, Edisi Keempat. Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2009.

Tutik, Titik Triwulan. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Prestasi Pustakakarya, 2006.

Wignjosoebroto, Soetandyo. *Hukum: Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya*. Jakarta: Elsam, 2002.

Yudhoyono, Bambang Susilo. *Revitalisasi Ekonomi Indonesia: Bisnis, Politik, dan Good Governance*. Jakarta: Brighten Press, 2003.

2. KARYA ILMIAH

Murni M, Nasra. "Upaya Penerapan Good Governance di Departemen Keuangan Republik Indonesia: Studi Kasus di Direktorat Jenderal Anggaran." Tesis, FISIP Universitas Indonesia, Jakarta, 2001.

Tampubolon, Carl Augustinus Hothinca Southon. "Analisis Hukum Terhadap Pemeungutan PNBP Berdasarkan Pemberitahuan Pabean yang Menggunakan Sistem Elektronik Data Interchange di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai." Tesis, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2008.

Sunarko. "Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) di Universitas Indonesia (Suatu Kajian tentang Hukum Administrasi Negara)." Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2005.

3. MAJALAH

BPN RI. "Sosialisasi LARASITA dalam Forum Komunikasi Bakohumas," *bhumibhakti*, Edisi 6, (Juni 2009).

BPN RI, "Sosialisasi Presiden RI Resmikan Peluncuran Mobil LARASITA," *bhumibhakti*, Edisi 5, (Mei 2009).

4. LAPORAN

BPK RI. "Hasil Pemeriksaan atas Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan Tahun 2009," Lampiran 1.

BPN RI. *Laporan Keuangan Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia untuk Periode yang Berakhir 31 Desember 2009 Tahun Anggaran 2009 (Unaudited)*. Jakarta: BPN RI, 2010.

_____. *Laporan Realisasi Anggaran Kementerian Negara/Lembaga untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2009 Tahun Anggaran 2009. (Final)*. Jakarta: BPN RI, 2010.

_____. *Laporan Keuangan Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia untuk Periode yang Berakhir 30 Juni 2010 Tahun Anggaran 2010 (Unaudited)*. Jakarta: BPN RI, 2010.

_____. *Laporan Penggunaan Dana Bantuan Pengelolaan Badan Pertanahan Nasional RI Tahun 2009*.

5. KAMUS

Laksana, Harimurti Krida. *Kamus Linguistik*, Edisi Keempat. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2009.

Team Pustaka Phoenix. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Baru*. Jakarta: Media Pustaka Phoenix, 2008.

Pusat Bahasa Pendidikan Nasional. *Tesaurus Alfabetis Bahasa Indonesia*. Jakarta: Mizan, 2009.

6. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DAN KEBIJAKAN

Indonesia. *Perubahan Keempat Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*.

_____. *Undang-undang tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak*. Undang-undang Nomor 20 Tahun 1997.

_____. *Undang-undang tentang Keuangan Negara*. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003.

_____. *Undang-undang tentang Perbendaharaan Negara*. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004.

_____. *Undang-undang tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara*. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004.

- _____. *Undang-undang tentang Pelayanan Publik*. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009.
- _____. *Undang-undang Tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme*. UU Nomor 28 Tahun 1999
- _____. *Undang-undang Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. UU Nomor 28 Tahun 2009.
- _____. *Undang-undang tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan*. UU Nomor 10 Tahun 2004.
- _____. *Undang-undang tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria*. UU Nomor 5 Tahun 1960.
- _____. *Peraturan Pemerintah tentang Jenis dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak*. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1997.
- _____. *Peraturan Pemerintah tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1997 tentang Jenis dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak*. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 1998.
- _____. *Peraturan Pemerintah Tata Cara Penggunaan Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Bersumber dari Kegiatan Tertentu*. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1999.
- _____. *Peraturan Pemerintah tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Badan Standarisasi Nasional*. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2001.
- _____. *Peraturan Pemerintah tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Badan Pertanahan Nasional*. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2002.
- _____. *Peraturan Pemerintah tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kantor Menteri Negara Lingkungan Hidup*. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2003.
- _____. *Peraturan Pemerintah tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Pada Departemen Agama*. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2004.
- _____. *Peraturan Pemerintah tentang Tata Cara Penyampaian Rencana dan Laporan Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)*. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2004.
- _____. *Peraturan Pemerintah tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia*. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2004.

_____. *Peraturan Pemerintah tentang Pemeriksaan Penerimaan Negara Bukan Pajak*. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2005.

_____. *Peraturan Pemerintah tentang Tata Cara Penentuan Jumlah, Pembayaran, dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Terutang*. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2009.

_____. *Peraturan Pemerintah tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Badan Pertanahan Nasional*. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2010.

_____. *Peraturan Presiden tentang Badan Pertanahan Nasional*. Perpres Nomor 10 Tahun 2006.

Kementerian Keuangan RI. *Persetujuan Penggunaan Sebagian Dana Penerimaan Negara Bukan Pajak pada Badan Pertanahan Nasional*. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 77/KMK.06/2002.

_____. *Persetujuan Penggunaan Sebagian Dana Penerimaan Negara Bukan Pajak pada Badan Pertanahan Nasional*. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 237/KMK.02/2010.

_____. *Peraturam Menteri Keuangan tentang Indeks Dalam Rangka Penghitungan Penetapan Tarif Pelayanan PNBPN pada Badan Pertanahan Nasional*. PMK Nomor 132/PMK.02/2010.

_____. *Peraturam Menteri Keuangan tentang Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga Tahun Anggaran 2011*. PMK Nomor 104/PMK.02/2010.

_____. *Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2010 Badan Pertanahan Nasional Propinsi Jawa Barat*. DIPA Nomor : 0037/056-01.02/XII/2010.

Direktur Jenderal Perbendaharaan. *Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara*. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-66/PB/2005.

_____. *Penatausahaan Penerimaan Negara Melalui Modul Penerimaan Negara*, Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-78/PB/2006.

BPN RI. *Peraturan Kepala BPN RI tentang Penyederhanaan dan Percepatan Standar Prosedur Operasi Pengaturan dan Pelayanan Pertanahan untuk Jenis Pelayanan Tertentu*, Peraturan Kepala BPN RI Nomor 6 Tahun 2008.

_____. *Surat Edaran tentang Biaya Operasional Lapang Pemeriksaan Tanah dan Biaya Transport*, Surat Edaran Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 300-1084 tanggal 2 Mei 2005.

_____. *Surat Edaran tentang Petunjuk Teknis Kegiatan Pengelolaan Dana Bantuan Pengelolaan/Transito, Transport, dan SPK/SPKS*. Surat Edaran Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1689-120.3-Settama tanggal 19 Mei 2008.

_____. *Surat Edaran tentang Biaya Transport untuk Kegiatan Pelayanan Pertanahan*, Surat Edaran Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 4955/2.1/XII/2009 tanggal 17 Desember 2009.

_____. *Pedoman Pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2010 di Lingkungan BPN RI*, Jakarta: BPN RI, 2010.

_____. *Surat Edaran tentang Penutupan Dana Bantuan Pengelolaan/Transito di Lingkungan Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia*, Surat Edaran Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1799/2.1/VI/2010.

7. DATA ELEKTRONIK

Bhawono, Aryo. "Ditemukan Pungutan Tanpa Dasar Hukum di BPN Rp114 M." <http://www.mediaindonesia.com>. Diunduh 29 September 2010.

Direktorat Jenderal Anggaran, "Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan RKA-KL Tahun Anggaran 2011," <http://www.anggaran.go.id/>. Diunduh 8 Nopember 2010.

Rfq. "Pungutan Negara Harus Memiliki Payung Hukum." <http://www.hukumonline.com>, Diunduh 27 Sepetember 2010.